

**ANALISIS PENERAPAN PRAKTEK AKUNTANSI PADA USAHA
KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Padang**



OLEH :

ERLINA ULI UBALDA SITANGGANG
2003 / 42659

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2008**

ABSTRAK

Erlina Uli Ubalda.S 2003/ 42659 : Analisis Penerapan Praktek Akuntansi Pada Usaha Kecil dan Menengah Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Untuk Wilayah Kota Padang. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 2008.

Pembimbing I : Drs. Syamwil, M.Pd

II : Ade Wirman, SE, M.Sc, Akt

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan praktek akuntansi yang dilihat dari faktor tingkat pendidikan, pelatihan akuntansi, serta pengalaman kerja di bidang akuntansi pemilik/pemimpin dan tenaga pembukuan pada UKM di Kota Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dari penelitian ini adalah UKM Formal yang memperoleh izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel digunakan adalah *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Laporan keuangan yang paling banyak dibuat oleh UKM di Kota Padang adalah laporan laba/rugi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan laporan arus kas, sedangkan laporan perubahan modal memang lebih sedikit Rata-rata praktek akuntansi keuangan perusahaan yang termasuk dalam kategori baik adalah akun pendapatan dan akun beban. Untuk akun kas dan bank, piutang, persediaan, aktiva tetap, dan modal dikategorikan cukup. Sedangkan akun utang, dan sistem akuntansi masing kurang. (2) Pemilik/pemimpin yang berpendidikan < SMA-SMA sebanyak 9 (25,7%) orang dan yang berpendidikan D3-S2 sebanyak 26 (74,3%) orang. Untuk tenaga pembukuan yang berpendidikan < SMA-SMA sebanyak 14 (40%) orang dan yang berpendidikan D3-S2 sebanyak 21 (60%) orang (3) Pemilik/pemimpin yang pernah mengikuti pelatihan akuntansi sebanyak 24 (68,6%) orang dan yang tidak pernah mengikuti pelatihan akuntansi sebanyak 11 (31,4%) orang. Untuk tenaga pembukuan yang pernah mengikuti pelatihan akuntansi 30 (85,7%) orang dan yang tidak pernah mengikuti pelatihan akuntansi sebanyak 5 (14,3%) orang (4) Pemilik/pemimpin yang berpengalaman di bidang akuntansi 18 (51,4%) orang dan yang tidak berpengalaman di bidang akuntansi sebelumnya sebanyak 17 (48,6%) orang. Untuk tenaga pembukuan yang berpengalaman di bidang akuntansi 23 (65,7%) orang dan yang tidak berpengalaman di bidang akuntansi sebelumnya sebanyak 12 (34,3%) orang.

Penulis menyarankan kepada Instansi yang terkait dengan pengembangan UKM, agar mengadakan pelatihan akuntansi yang lebih memfokuskan pada pembuatan laporan keuangan dan segera merancang peraturan khusus untuk menyelenggarakan pembukuan pada UKM.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Praktek Akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Padang”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian program Strata satu (S1). Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terima kasih kepada Bapak Drs. Syamwil, M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak Ade Wirman, SE, M.Sc, Akt selaku pembimbing II dan Ibu Rosyeni Rasyid, SE, ME sebagai penasehat akademik yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu, dan bimbingan serta masukan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong penulis yang menyelesaikan studi dan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu dosen penguji atas masukannya pada seminar proposal skripsi dan ujian skripsi.

4. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Seluruh pemilik/pimpinan dan tenaga pembukuan usaha kecil dan menengah di Kota Padang yang telah memberikan bantuan dalam penelitian ini.
6. Kedua orang tua, saudara, dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman mahasiswa angkatan 2003 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran dan informasi yang sangat berguna.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan pengetahuan serba terbatas penulis berusaha menyajikan skripsi ini walaupun dapat dikatakan jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
 BAB II. KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kajian Teori	
1. Pengertian Akuntansi dan Sistem Akuntansi	12
a. Pengertian Akuntansi	12
b. Sistem Informasi	14

2. Laporan Keuangan dan Penerapan SAK.....	17
1. Neraca	29
2. Laporan Rugi/Laba	31
3. Laporan Perubahan Ekuitas.....	35
4. Laporan Arus Kas	35
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	36
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktek Akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah	37
a. Tingkat Pendidikan	38
b. Pelatihan Akuntansi	40
c. Pengalaman Kerja di bidang Akuntansi.....	41
4. Tinjauan Mengenai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ..	42
B. Penelitian Terdahulu	46
C. Kerangka Konseptual.....	48

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	51
B. Tempat dan Waktu Penelitian	51
C. Populasi dan Sampel	51
D. Jenis dan Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Instrumen Penelitian	55
G. Teknik Analisis Data.....	59
H. Definisi Operasional	60

BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Sampel dan Respoden Penelitian	64
B. Analisis Deskriptif	65
1. Karakteristik Responden Usaha Kecil dan Menengah.....	65
a. Jenis Kelamin	65
b. Lama Bekerja	66
c. Umur Perusahaan	67
d. Bidang Usaha	67
e. Daerah Pemasaran.....	68
f. Jumlah Tenaga Kerja	69
g. Skala Usaha.....	70
h. Bentuk Hukum	71
2. Deskripsi Hasil Penelitian	72
a. Praktek Akuntansi Pada UKM.....	72
b. Tingkat Pendidikan Responden	75
c. Pelatihan Akuntansi Yang Pernah Diikuti Responden	77
d. Pengalaman Kerja Responden Di Bidang Akuntansi	79
C. Pembahasan.....	80

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Sampel Penelitian.....	54
2. Instrumen Penelitian	56
3. Tingkat Pengembalian Kuesioner	65
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	65
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	66
6. Karakteristik UKM Berdasarkan Umur Perusahaan	67
7. Karakteristik UKM Berdasarkan Bidang Usaha	67
8. Karakteristik UKM Berdasarkan Daerah Pemasaran.....	68
9. Karakteristik UKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja	69
10. Karakteristik UKM Berdasarkan Skala Usaha.....	70
11. Karakteristik UKM Berdasarkan Bentuk Hukum	71
12. Jenis Laporan Keuangan Yang Disusun UKM	72
13. Praktek Akuntansi Keuangan Pada UKM Untuk Masing-Masing Akun Dalam Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi	73
14. Praktek Akuntansi Keuangan Pada UKM.....	75
15. Tingkat Pendidikan Formal Responden	76
16. Disiplin Ilmu Responden	77
17. Frekuensi Pelatihan Akuntansi yang diikuti Responden.....	77
18. Jenis Pelatihan Akuntansi Yang Pernah Diikuti Responden.....	79
19. Pengalaman Kerja Responden Di Bidang Akuntansi.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
a. Kuesioner Penelitian	94
b. Tabulasi Data Penelitian	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peranan penting bagi kebanyakan negara terutama dalam bidang perekonomian, termasuk Indonesia. Perkembangan dan pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah telah menjadi penggerak yang penting bagi negara-negara berkembang. Perusahaan kecil dan menengah memegang peranan yang penting dalam perekonomian terutama bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap usaha kecil dan menengah, pemerataan pendapatan melalui kesempatan berusaha, pengembangan daerah pedesaan, mengembangkan pembangunan antar daerah, meningkatkan investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional (Tambunan,2002:3).

Hal ini dapat dilihat meningkatnya dari ekspor komoditi non migas terutama pada sektor usaha rumah tangga yang banyak menyerap tenaga kerja seperti industri tekstil dan garmen, hasil kerajinan sepatu dan meubel. Pada tahun 2000, usaha kecil menyerap lebih kurang 66,8 juta tenaga kerja atau sekitar 89,4% dari total tenaga kerja Indonesia. Sedangkan usaha menengah menyerap lebih kurang 7,5 juta orang tenaga kerja atau sekitar 10% dari total tenaga kerja. Hal ini disebabkan bidang usaha, terutama perusahaan kecil yang bersifat padat karya dan biasanya tersebar hingga pelosok daerah. Peranan perusahaan kecil dan menengah ini pun terlihat nyata dalam kontribusi keduanya terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia. Pada tahun 2000 kontribusi perusahaan kecil dan

menengah terhadap total GDP Indonesia sebesar 40,4% dan 16,35%. Jadi lebih dari 50% PDB berasal dari sumbangan UKM (Tambunan,2002:4-15).

Pada saat ini, Pemerintah Pusat mempunyai program untuk memberikan bantuan kredit sekitar Rp.20 triliun untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah berjalan sejak tahun 2007 dan akan terus bergulir. Dan keputusan Pemerintah Pusat untuk menghapuskan utang UMKM senilai Rp.17,9 triliun di empat bank Pemerintah sejak tahun 1980, diharapkan bisa menjadikan UMKM bergerak lagi. Menurut Kadin Sumatera Barat siap berkerjasama dengan instansi terkait dengan memberikan fasilitas untuk kepentingan UMKM, guna mendapatkan pinjaman atau kredit pemerintah melalui bank-bank pelaksana. Pada tahap pertama, pemerintah Sumbar telah mengajukan 50 unit industri kecil Sumbar untuk mendapatkan kredit. Pemerintah Sumbar menargetkan pada tahun 2008 sebanyak 366 UMKM akan dibina untuk program tersebut.(Singgalang,19 November 2007:2).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar mempunyai salah satu misi, yaitu menjadikan UKM Sumbar dan sebagai UKM yang modern maksudnya adalah mengupayakan agar UKM Sumbar menjadi maju, mandiri dan berorientasi pasar global. Kontribusi yang diberikan terhadap PDRB kota Padang pada tahun 2002 mencapai 14,63% atau merupakan sektor ketiga terbesar kontribusinya setelah sektor angkutan, komunikasi dan perdagangan, hotel dan restoran (Laporan Inventarisasi & Evaluasi Program Dana Bergulir kota Padang,2002:1). Berdasarkan data izin industri formal kota Padang tahun 2006, jumlah usaha menengah sebanyak 30 unit usaha, dan usaha kecil berjumlah 97

unit usaha, sedangkan usaha rumah tangga sebanyak 92 unit usaha. Usaha-usaha tersebut dikelompokkan menjadi 5 industri, yaitu 1).Industri logam,mesin, dan elektronik terdiri dari 37 unit, 2).Industri aneka industri sebanyak 44 unit, 3).Industri agro berjumlah 57 unit, 4).Industri hasil hutan sebanyak 30 unit, dan 5).Industri pulp dan kimia sebanyak 43 unit.(Dispernindag kota Padang).

Perusahaan kecil dan menengah telah terbukti memiliki peranan penting dalam perekonomian, namun pengembangan usaha tersebut masih banyak memerlukan pembenahan atau perbaikan. Salah satunya adalah pembenahan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan perusahaan. Keputusan yang baik didasari oleh informasi yang ada dan begitu pula dengan keputusan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan memerlukan pendukung informasi keuangan. Pengguna akuntansi juga bervariasi, dari sekedar memahami akuntansi sebagai : 1) alat hitung menghitung; 2) sumber informasi dalam pengambilan keputusan; 3) sampai ke pemikiran bagaimana akuntansi diterapkan sejalan dengan (sebagai bentuk pengalaman) ajaran agama. Bila dihubungkan dengan kelompok UKM tampaknya pemahaman terhadap akuntansi masih berada pada tataran pertama dan kedua yaitu sebagai alat hitung-menghitung dan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan (Basuki,2000:174). Menurut Benjamin dan Muntoro (1990) yang dikutip Ramadani (2005:5), praktek akuntansi khususnya akuntansi keuangan pada UKM di Indonesia masih rendah dan memiliki banyak kelemahan. Kelemahan itu antara lain disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

dari manajer pemilik, dan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UKM.

Laporan keuangan yang berkualitas akan memberikan informasi penting kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkualitas. Diharapkan informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang bisa mengukur dan mengkomunikasikan informasi keuangan tentang kegiatan ekonomi. Beberapa penelitian pada UKM telah menyimpulkan bahwa pengguna informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan akan mempengaruhi prestasi perusahaan (Suhairi,2004). Laporan keuangan adalah merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability* dan menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan (Harahap,2003:201).

Pada kenyataannya, belum seluruh UKM yang telah melaksanakan informasi akuntansi dengan membuat laporan keuangan secara berkala. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh UKM. Mayoritas UKM baik pemilik maupun karyawan masih sangat terbatas pengetahuan akan pentingnya penyelenggaraan informasi akuntansi secara berkala (Tunggal,1997:5).

Pemilik perusahaan kecil sangat jarang memperoleh akses terhadap informasi yang diperlukan untuk mengambil berbagai tindakan dalam operasi

perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan kecil dan menengah di Indonesia cenderung tidak menyusun laporan keuangan yang merupakan sumber informasi akuntansi dalam kegiatan usahanya. Ada banyak faktor yang menyebabkan perusahaan kecil dan menengah kurang memfokuskan penyediaan dan penggunaan informasi akuntansi. Salah satunya adalah faktor pendidikan pemilik yang sekaligus pengelola. Padahal tujuan penyediaan informasi akuntansi tersebut selain untuk meningkatkan keefektifan kegiatan operasional, dapat juga memberi manajemen informasi mengenai operasional keuangan yang baik sehingga keputusan yang diambil manajemen lebih efektif. Pendidikan pemilik atau pengelola yang rendah cenderung mengabaikan akuntansi dalam pengelolaan usaha. Namun hal ini tidak sepenuhnya berlaku untuk perusahaan menengah yang memiliki manajer yang berpendidikan tingkat perguruan tinggi (Holmes dan Nicholls, 1989) yang dikutip Andreana (2001:4).

Menurut Tilaar (1997:24) menyatakan bahwa pendidikan formal tidak menjamin seseorang mempunyai keterampilan yang dibutuhkan, sehingga perlu mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam mengelola perusahaan. Tingkat pendidikan seorang pemimpin akan menentukan tingkat keberhasilan pimpinan dalam mengelola perusahaannya, karena semakin tinggi pendidikan pimpinan maka pemahamannya akan pentingnya informasi akuntansi akan semakin besar. Selain pendidikan formal, untuk mendapatkan tenaga profesional dibidangnya, maka pimpinan perusahaan perlu memperoleh pelatihan-pelatihan untuk dapat meningkatkan kemampuan teknisnya dalam mengelola perusahaan (Siswanto, 1987:47).

Pada prinsipnya, penyelenggaraan akuntansi pada sebuah perusahaan bertujuan untuk menyajikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi tersebut, seperti pihak manajemen, investor, kreditor, pemerintah dan lain sebagainya. Oleh karena itu praktek akuntansi menjadi sangat penting dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi perusahaan dari segi *financial* dan prospeknya di masa yang datang. Salah satu faktor yang erat kaitannya dengan praktek akuntansi pada sebuah perusahaan adalah kemampuan tenaga pembukuannya. Kemampuan tenaga pembukuan yang memadai di bidang akuntansi tentu saja diharapkan akan membuat akuntansinya juga semakin baik.

Dalam perkembangan UKM masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan dalam bidang-bidang yang berkaitan erat dengan pengembangan usaha. Salah satu pengetahuan tersebut adalah dalam bidang akuntansi. Banyak dari pengusaha kecil tidak mengerti pencatatan keuangan. Ada yang telah melakukan pencatatan akuntansi, tapi masih menghadapi kendala dalam menyusun laporan keuangan dan sebagainya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Deseighty (2004), ditemukan bahwa sistem pencatatan akuntansi industri kecil masih dalam bentuk sederhana. Sebagian besar industri kecil tersebut hanya membuat buku penerimaan kas dan pengeluaran kas saja. Perusahaan kemudian mengurangkan total penerimaan kas dengan total pengeluaran kas didapat angka/jumlah laba atau rugi perusahaan. Banyak di antara mereka yang memiliki catatan di kepala, atau di kertas-kertas lepas atau bahkan tidak sama sekali. Umumnya UKM akan membuat laporan

keuangan secara lengkap, jika akan meminta bantuan kredit kepada Bank dan Koperasi atau dari Pemerintah, dikarenakan laporan keuangan tersebut merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pihak yang bersangkutan.

Alasan utama ketertarikan peneliti dalam meneliti penerapan praktek akuntansi dikaitkan dengan faktor tingkat pendidikan, pelatihan akuntansi, dan pengalaman kerja di bidang akuntansi pemilik/pemimpin serta tenaga pembukuan UKM yang menjadi binaan Disperindag Padang adalah untuk mengetahui atau menggambarkan apakah praktek akuntansi yang dilaksanakan UKM sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan praktek akuntansi yang diajukan dalam proposal penelitian yang berjudul: **Analisis Penerapan Praktek Akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Padang**". Alasan penulis memilih daerah ini adalah karena dapat disurvei langsung dan Kota Padang memiliki jumlah UKM yang cukup banyak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran faktor tingkat pendidikan pemilik/pemimpin dan tenaga pembukuan UKM kota Padang mampu menerapkan praktek akuntansi sesuai dengan SAK yang berlaku? pada usaha kecil dan menengah?
2. Bagaimanakah gambaran faktor pelatihan akuntansi yang pernah diikuti pemilik/pemimpin dan tenaga pembukuan UKM kota Padang mampu menerapkan praktek akuntansi sesuai dengan SAK yang berlaku? pada usaha kecil dan menengah?
3. Bagaimanakah gambaran faktor pengalaman kerja pemilik/pemimpin dan tenaga pembukuan UKM kota Padang mampu menerapkan praktek akuntansi sesuai dengan SAK yang berlaku? pada usaha kecil dan menengah?
4. Bagaimanakah penerapan praktek akuntansi pada UKM di kota Padang?
5. Apakah UKM kota Padang memiliki internal kontrol yang efektif?
6. Apakah terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan UKM?
7. Apakah UKM kota Padang menggunakan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan perusahaan?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan yang akan dibahas dan data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini hanya untuk menganalisis faktor tingkat pendidikan, pelatihan akuntansi, dan pengalaman kerja di bidang akuntansi pemilik/pemimpin dan tenaga pembukuan UKM kota Padang mampu menerapkan praktek akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran faktor tingkat pendidikan pemilik/pemimpin dan tenaga pembukuan UKM kota Padang mampu menerapkan praktek akuntansi sesuai dengan SAK yang berlaku? pada usaha kecil dan menengah?
2. Bagaimanakah gambaran faktor pelatihan akuntansi yang pernah diikuti pemilik/pemimpin dan tenaga pembukuan UKM kota Padang mampu menerapkan praktek akuntansi sesuai dengan SAK yang berlaku? pada usaha kecil dan menengah?
3. Bagaimanakah gambaran faktor pengalaman kerja pemilik/pemimpin dan tenaga pembukuan UKM kota Padang mampu menerapkan praktek akuntansi sesuai dengan SAK yang berlaku? pada usaha kecil dan menengah?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis/menggambarkan apakah faktor tingkat pendidikan pemilik/pemimpin dan tenaga pembukuan UKM kota Padang mampu menerapkan praktek akuntansi sesuai dengan SAK yang berlaku?
2. Untuk menganalisis/menggambarkan apakah aktor pelatihan akuntansi yang diikuti pemilik/pemimpin dan tenaga pembukuan UKM kota Padang mampu menerapkan praktek akuntansi sesuai dengan SAK yang berlaku?
3. Untuk menganalisis/menggambarkan apakah faktor pengalaman kerja pemilik/pemimpin dan tenaga pembukuan UKM kota Padang mampu menerapkan praktek akuntansi sesuai dengan SAK yang berlaku?

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Padang.

2. Bagi Pihak Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi pihak terkait sebagai sumber informasi yang nantinya dapat diterapkan dalam perusahaan untuk meningkatkan kualitas penerapan praktek akuntansi.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca dan menjadi acuan riset untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kajian Teori

1. Pengertian Akuntansi dan Sistem Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi tepatnya akuntansi keuangan atau ada juga yang menyebut *accounting* adalah merupakan bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu. Akuntansi lahir dengan maksud tertentu, yaitu untuk memberikan jasa kepada penggunanya berupa informasi keuangan yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan (Harahap,2003:3).

Akuntansi adalah suatu nama yang diberikan pada suatu pelaksanaan sistem pencatatan yang berlaku umum atas berbagai kejadian di dalam sesuatu kegiatan usaha. Akuntansi sebagai suatu sistem, telah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu dan sampai saat ini beberapa konvensi telah tercipta dan diterima sebagai suatu hal yang sangat berfaedah (Tunggal,1997:5). Karena tanpa adanya catatan-catatan tersebut akan sulit seseorang ataupun perusahaan dalam memantau usahanya. Akuntansi juga bertujuan untuk membuat perencanaan dan mengevaluasi kinerja suatu entitas terutama yang bersifat *financial*.

Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT), akuntansi diartikan sebagai "proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya". Sedangkan menurut komite *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) definisi akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengiktisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Accounting Principle Board (APB) Statement No.4 mendefinisikan akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih di antara beberapa alternatif.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses untuk mencatat semua kejadian ekonomis pada suatu entitas untuk menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomis.

Proses akuntansi adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah sehingga dasar terjadinya transaksi, kemudian berdasarkan data atau bukti ini maka diinput ke proses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan. Adapun proses akuntansi secara rinci sebagai berikut:

1. Identifikasi, pada proses ini diidentifikasi kejadian-kejadian yang termasuk dalam kejadian ekonomi yang akan mempengaruhi posisi keuangan.
2. Pengukuran, kejadian ekonomi yang telah diidentifikasi diukur dalam unit moneter.

3. Pencatatan, adalah pengumpulan data secara kronologis. Tahap ini adalah pencatatan pertama kali ke jurnal.
4. Penggolongan, bertujuan agar penyajian dapat diringkaskan. Dalam tahap ini transaksi dikelompokkan dalam perkiraan yang sejenis.
5. Pengikhtisaran, adalah menyajikan informasi yang telah digolongkan ke dalam laporan seperti yang diinginkan oleh pemakai.

b. Sistem Informasi

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 2001:5). Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001:3).

Menurut Warren, Reeve dan Fees (1999:178) mendefinisikan sistem akuntansi sebagai berikut: *an accounting system is the methods and procedures for collecting, classifying, summarizing and reporting business financial and operating information.* Input dalam sistem akuntansi adalah transaksi-transaksi bisnis yang sudah direkam dalam berbagai bukti transaksi.

Sistem akuntansi dapat dilihat dari:

- 1). Organisasi dan pembagian wewenang dalam perusahaan

Organisasi dan pembagian wewenang digunakan untuk melihat pengendalian intern pada perusahaan. Pengendalian intern dan buku Sugiri (1999:3) adalah sebagai berikut:

”Pengendalian intern meliputi koordinasi struktur organisasi dan semua cara serta alat yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk:(1) mengamankan

harta perusahaan,(2) meningkatkan ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi,(3) meningkatkan efisiensi operasi, dan (4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan”.

Pengendalian intern yang dikaitkan dengan proses akuntansi di perusahaan, dapat dilihat dari:

(1). Struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan rerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi,2001:165).

(2) Pembagian wewenang yang diatur tertulis

Setiap organisasi haruslah menunjukkan secara jelas orang-orang atau departemen-departemen yang bertanggungjawab atas fungsi-fungsi, seperti: penjualan, pembelian, penagihan piutang, dan pembuatan catatan akuntansi. Garis-garis otorisasi dan tanggung jawab dapat dipaparkan pada bagan organisasi, yang didukung oleh deskripsi-deskripsi jabatan tertulis dan prosedur manual yang menjelaskan secara rinci otorisasi dan tanggung jawab setiap orang atau departemen yang terdapat pada bagan organisasi (Simamora,2000:208)

(3) Pemisahan tugas

Sistem pengendalian intern yang baik sepatutnya melengkapi diri dengan pemisahan tanggung jawab fungsional yang tepat. Hal ini berarti bahwa tidak ada departemen yang bertanggungjawab

menangani semua tahap transaksi. Terdapat dua penjabaran prinsip ini menurut Simamora (2000:208), yaitu:

- Tanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan harus dilimpahkan kepada individu-individu yang berbeda.
- Tanggung jawab atas pembentukan akuntabilitas (membuat catatan-catatan) atas suatu aktiva haruslah terpisah dari penjaga fisik aktiva tersebut.

2). Catatan akuntansi yang dimiliki perusahaan

Catatan akuntansi yang dimiliki perusahaan antara lain berupa buku harian perusahaan, daftar rekening buku besar, buku catatan akuntansi yang digunakan dan formulir yang digunakan oleh perusahaan, dapat dilihat dari unsur-unsur sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001:3) adalah:

1. Formulir merupakan dokumen pertama yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas. Formulir sering pula disebut dengan istilah media, karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan.
2. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat mengklasifikasi dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya

diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

3. Buku besar (*general ledgers*) adalah kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Perkiraan tersebut diberi nomor urut dan ini disebut kode akun (*chart of account*).
4. Buku pembantu (*subsidiary ledgers*) adalah suatu cabang buku besar yang berisi rincian rekening tertentu yang ada dalam buku besar. Buku besar pembantu berisi rincian akun tertentu yang ada di buku besar.
5. Laporan, hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran dan laporan harga pokok penjualan daftar umur piutang, daftar hutang yang akan dibayar.

2. Laporan Keuangan dan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Laporan keuangan adalah merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability*. Dan juga menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. Standar Akuntansi

Indonesia merumuskan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.1,2002) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

”Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.

Kesesuaian masing-masing item dalam laporan keuangan dengan standar akuntansi didasarkan pada tiga kriteria, yaitu:

- Penilaian (pengukuran) adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Dasar pengukuran tersebut seperti biaya historis, biaya kini, nilai realisasi/penyelesaian, nilai sekarang. Dasar pengukuran yang lazim digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis.
- Penyajian berkaitan dengan bagaimana setiap pos-pos dalam neraca maupun laporan keuangan. Penyajian ini berkaitan dengan pengkodean akun-akun yang digunakan dan pengelompokan letak

akun-akun tersebut dalam laporan keuangan serta berkaitan juga dengan nilai yang disajikan dimana nilai yang disajikan berupa nilai neto.

- Pengungkapan berisikan informasi atas pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan beserta kebijakan-kebijakan dan gambaran struktur dan penanggungjawab organisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijabarkan bahwa laporan keuangan yang merupakan output proses pelaporan keuangan terdiri dari:

1. Neraca

Neraca adalah laporan kekayaan (*asset*), utang (*liabilities*) dan modal dari suatu kesatuan usaha pada suatu tanggal tertentu. Suatu neraca lazimnya dibagi dalam dua bagian, yaitu aktiva (*asset*) dan pasiva (*liabilities* dan *stockholders equity*) (Tunggal,1997:17).

A). Aktiva (*assets*)

Assets adalah setiap barang yang mempunyai wujud secara fisik (*tangible*) maupun barang yang tidak mempunyai wujud fisik (*intangible*) yang mempunyai nilai uang. Aktiva adalah hak-hak dan harta yang merupakan sumber penghasilan yang dapat memberikan hasil pada masa sekarang dan masa yang akan datang, atau dalam perkataan lain ialah segala harta-harta yang dimiliki pada saat ini. Aktiva menurut Tunggal (1997:18) terdiri atas:

1). Aktiva lancar

Aktiva lancar, dalam kelompok ini termasuk uang kas dan harta-harta lainnya, yang pada lazimnya dapat diharapkan menjadi tunai sesuai dengan kebiasaan perusahaan yang diukur selama satu periode operasi yang tertentu (*normal operating cycle*) (Tunggal,1997:18).

a. Kas dan Bank

Menurut Baridwan (2000:85), kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Kas merupakan golongan aktiva lancar yang paling likuid. Pembagian kas menurut PSAK No.2 (2004:P.05), kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro (bank). Secara prinsip penilaian kas dan bank tidak begitu sulit karena nilai langsung dapat diperoleh dari perhitungan fisik kas yang ada di tangan maupun dengan menggunakan informasi pada buku besar, buku kas dan rekening koran. Yang menjadi masalah jika kas tersebut berbentuk mata uang asing sehingga harus ditentukan nilai rupiahnya berdasarkan kurs yang berlaku.

Penyajian kas dan bank dalam neraca harus terpisah antara kas yang ada di tangan, rekening giro dan juga *petty cash*. Nilai kas yang disajikan harus dalam mata uang yang sama. Rekening pada bank yang berbeda tidak perlu dipisahkan hanya saja perlu untuk

diungkapkan. Informasi tambahan yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan kas dan bank antara lain:

- a. Jenis rekening dan nama bank tempat penyimpanan rekening yang bersangkutan.
- b. Rekening-rekening yang dalam masalah seperti rekening yang sedang diblok oleh pihak bank.
- c. Pihak-pihak yang memiliki otorisasi untuk mengeluarkan kas dan rekening bank.
- d. Metode pengisian kembali *petty cash*.
- e. Kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan kas dan bank.

b. Piutang

Berdasarkan sumber terjadinya piutang digolongkan menjadi piutang dagang (*trade receivable*) dan piutang non-dagang (*nontrade receivable*). Piutang dagang adalah piutang kepada pelanggan atau pihak lainnya yang berasal dari usaha pokok normal perusahaan. Piutang dagang digolongkan lagi menjadi piutang usaha dan piutang wesel (*notes receivable*).

Piutang usaha merupakan piutang dagang dengan tidak menggunakan jaminan (janji tertulis). Piutang usaha harus dilaporkan pada nilai bersih yang dapat direalisasikan atau nilai kas yang diharapkan dan bukan pada nilai tunai. Sehingga perusahaan harus membuat alokasi untuk cadangan piutang tak tertagih sebagai pengurangan nilai piutang keseluruhan. Penetapan cadangan piutang

ini dapat dilakukan berdasarkan umur piutang maupun dengan estimasi pihak manajemen berdasarkan pengalaman operasional periode-periode sebelumnya.

Sedangkan piutang wesel adalah *written promises to pay a certain sum of money on a specified future date. They may arise from sales, financing, or other transaction* (Kieso et al,2004:319). Piutang wesel dapat dalam jangka pendek atau jangka panjang. Piutang non-dagang menurut Kieso et al (2004:319) *arise from a variety of transaction and can be written promises aither to pay or to deliver.*

Pengungkapan yang berkaitan dengan piutang antara lain:

- a. Metode yang digunakan dalam membentuk penyisihan piutang tak tertagih.
- b. Pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang memiliki piutang pada perusahaan.
- c. Rata-rata umur piutang
- d. Piutang bermasalah
- e. Piutang yang dijadikan jaminan kewajiban
- f. Kebijakan-kebijakan lainnya

c. Persediaan

Menurut PSAK No.14 (2004, P.3), persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nilai persediaan harus diukur berdasarkan nilai yang terendah antara biaya dengan nilai realisasi bersih (harga pasar). Biaya persediaan terdiri atas

beberapa komponen, yaitu biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain-lain.

Persediaan harus disajikan terpisah menurut jenisnya., misalnya pada perusahaan dagang harus dipisahkan menurut jenisnya. Contohnya yang paling jelas adalah pada perusahaan manufaktur (industri), dimana harus dipisahkan antara persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi serta persediaan bahan penolong.

Pengungkapan yang terkait dengan persediaan (PSAK No.14,2004:P.31) antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang dipakai.
- b. Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi perusahaan.
- c. Jumlah tercatat persediaan yang tercatat sebesar nilai realisasi bersih
- d. Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai penghasilan selama periode
- e. Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan
- f. Nilai tercatat yang dijadikan jaminan kewajiban

d. Biaya Dibayar Dimuka

Menurut Baridwan (2000:70) biaya dibayar dimuka adalah biaya-biaya yang sudah dibayar tetapi belum dibebankan pada sebagai biaya pada periode itu. Biaya-biaya tersebut akan dibebankan pada periode mendatang. Penilaian biaya dibayar dimuka tidaklah sulit karena tertera

pada kontrak, baik pada kontrak asuransi maupun kontrak sewa. Yang perlu diperhatikan adalah pembebanan biaya pada setiap periodenya karena manfaat dari uang muka tidak biasanya lebih dari satu periode sehingga harus ada alokasi beban periodiknya.

Pengungkapan yang berkaitan dengan uang muka antara lain:

- a. Masa berlaku kontrak
- b. Pihak-pihak yang terikat kontrak
- c. Penjabaran setiap jenis uang muka
- d. Lain-lain

2). Investasi Jangka Panjang

Soemarso mendefinisikan investasi jangka panjang sebagai investasi yang dilakukan dalam jangka waktu beberapa tahun dan tidak dimaksudkan untuk memutarakan kelebihan uang kas. PSAK No.13 (2004:P.3) menyatakan investasi jangka panjang merupakan aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, deviden dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan, yang jangka waktunya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 1 tahun). Investasi jangka panjang dinilai berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga beli dan

biaya-biaya lainnya seperti komisi broker, jasa bank dan pungutan oleh bursa efek.

Pengungkapan yang berkaitan dengan uang muka antara lain:

- a. Jumlah signifikan yang dilaporkan sebagai penghasilan investasi untuk bunga, royalty, dividen an sewa pada investasi jangka panjang
- b. Kebijakan untuk kekerapan revaluasi dan tanggal revaluasi terakhir (jika terjadi penilaian kembali)

3). Aktiva Tetap

Aktiva tetap, dalam bentuk kelompok ini lazimnya dikelompokkan harta-harta yang relatif sifatnya permanen, dan dipergunakan dalam operasi usaha perusahaan, yaitu sama sekali tidak dimaksud untuk dijual kembali (kecuali sudah usang atau aus). PSAK No.16 (2004:P.5) mendefinisikan aktiva tetap sebagai aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode (1 tahun).

Nilai aktiva tetap yang harus dicantumkan pada laporan keuangan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan mulai dari pembelian (termasuk harga beli) sampai aktiva tersebut dapat digunakan. Pengeluaran lain setelah aktiva tersebut digunakan menjadi biaya

periodik kecuali yang meningkatkan kapasitas dan umur ekonomis aktiva yang bersangkutan harus dikapitalisasikan (PSAK No.16:P.23).

Aktiva tetap disajikan terpisah menurut jenisnya ke dalam akun-akun yang tersendiri, misalnya tanah dan bangunan merupakan dua akun yang tersendiri. Nilai aktiva yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan nilai neto dari aktiva yang bersangkutan, yaitu nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan, dengan syarat harus diungkapkan nilai perolehan, dan metode penyusutan yang digunakan pada bagian *disclosure* (berkaitan dengan masalah pengungkapan). Jika yang dicantumkan merupakan nilai perolehan maka harus diselenggarakan perkiraan akumulasi penyusutannya (PSAK No.16:P.5)

Pengungkapan yang terkait dengan aktiva tetap antara lain:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto.
- b. Metode penyusutan yang digunakan.
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- e. Kebijakan dan informasi lainnya (terinci dalam PSAK No.14:P.49-51).

4). Aktiva Tidak Berwujud

Aktiva yang tidak berbentuk atau tidak berupa benda, tetapi diperoleh dengan mengeluarkan uang. Berdasarkan PSAK No.19(2004), aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat didefinisikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Contohnya aktiva tak berwujud antara lain: hak paten, merek dagang, hak cipta, waralaba, dan goodwill.

Pengungkapan yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud ini adalah:

- a. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan
- b. Metode amortisasi yang digunakan
- c. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode
- d. Unsur pada laporan keuangan yang didalamnya terdapat amortisasi aktiva tidak berwujud
- e. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode

5). Aktiva Lain-lain

Aktiva lain-lain menurut PSAK No.16 (2004:P.55) adalah pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva tetap dan juga tidak dapat digolongkan dalam aktiva lancar, investasi/penyertaan maupun aktiva tak berwujud. Yang termasuk aktiva lain-lain antara lain: aktiva tetap yang tidak digunakan, piutang kepada pemegang saham, beban yang ditangguhkan.

B). Kewajiban

Kewajiban merupakan suatu bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang, sehubungan dengan pertambahan harta atau jasa yang diterima atau dinikmati suatu perusahaan. Lazimnya utang ini terdiri dari 2 (dua) kelompok besar (Tunggal,1997:19), yaitu:

1. Kewajiban Lancar (*current liabilities*)

Soemarso mendefinisikan kewajiban lancar sebagai kewajiban-kewajiban yang penyelesaiannya harus dilakukan dengan penggunaan aktiva lancar atau pembentukan kewajiban lainnya. Menurut PSAK No. 1 (2004:P.44) suatu kewajiban dapat digolongkan kepada kewajiban jangka pendek (lancar) jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan (satu tahun).

2. Kewajiban Jangka Panjang (long-term liabilities)

Kewajiban ini biasanya timbul karena adanya kebutuhan dana untuk pembelian tambahan aktiva tetap, menaikkan jumlah modal kerja permanen, membeli perusahaan lain atau untuk melunasi kewajiban yang lain.

Penilaian kewajiban pada dasarnya berupa besarnya pokok hutang ditambah dengan perhitungan bunga yang dibebankan oleh kreditur kepada perusahaan. Kewajiban jangka pendek memiliki umur paling lama 1 tahun sementara kewajiban jangka panjang memiliki umur lebih dari 1 periode akuntansi (lebih dari 1 tahun).

Kewajiban juga harus disajikan terpisah berdasarkan jenisnya. Di samping itu penyajian kewajiban juga harus terpisah antara kelompok kewajiban jangka panjang dan kelompok kewajiban jangka pendek.

Pengungkapan yang berkaitan dengan kewajiban antara lain :

- a. Karakteristik pinjaman
- b. Persyaratan dan jaminan dalam kontrak pinjaman
- c. Lain-lain

C). Ekuitas

Modal adalah istilah yang digunakan untuk menanyakan hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Modal adalah sisa dari jumlah kekayaan setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban. Sedangkan menurut PSAK No. 21 (2004:P.02) merupakan bagian hak pemilik

dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Ekuitas terdiri atas setoran pemilik `yang seringkali disebut modal atau simpanan pokok anggota untuk badan hukum koperasi, saldo laba, dan unsur lain (PSAK No. 21,2004).

Modal merupakan kelompok yang terpisah dengan kewajiban meskipun memberikan fungsi yang sama dengan kewajiban, yaitu sebagai penyediaan dana. Modal pada perusahaan perorangan disebut ekuitas pada perseroan karena memiliki struktur yang lebih kompleks. Pada dasarnya ekuitas (modal pada perusahaan perorangan) berskala dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas akan berkurang terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan atau jika perusahaan mengalami kerugian. (PSAK No. 21,2004:P.03).

Perbedaan mendasarkan antara ekuitas dengan kewajiban adalah jika penyerahan instrumen keuangan mengandung kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang maka instrumen keuangan tersebut digolongkan sebagai kewajiban. (PSAK No. 21,2004:P.06). Sedangkan yang tergolong ekuitas dimana pemegang instrumen keuangan tidak mempunyai hak keuangan di masa yang akan datang pada penerbit instrumen, namun secara berhak secara proporsional atas deviden atau distribusi berlandas ekuitas. Ekuitas disajikan pada

neraca setelah kewajiban. Bentuk penyajiannya sesuai dengan akta pendirian usaha tersebut.

Pengungkapan yang berkaitan dengan modal antara lain :

- a. Daftar pemilik modal
- b. Struktur kepemilikan
- c. Kebijakan pembagian laba usaha

2. Laporan Laba /Rugi

Laporan rugi laba merupakan laporan yang memuat ikhtisar dari pendapatan dan biaya-biaya dari suatu kesatuan usaha untuk suatu periode tertentu (Tunggal,1997:21). Dalam laporan ini disajikan hasil usaha yang berupa pendapatan (baik pendapatan jasa maupun penjualan) dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Secara umum biaya terbagi atas tiga kelompok, yaitu harga pokok produksi (penjualan), biaya operasi, dan biaya lain-lain. Selisih antara pendapatan dan biaya-biaya ini merupakan laba (jika selisihnya positif / pendapatan lebih besar dari biaya) dan rugi jika terjadi sebaliknya.

(a). Pendapatan

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dan rabat volume yang yang diperbolehkan perusahaan (PSAK No.23,2004:P.9). Secara teoritis pendapatan dapat diakui pada beberapa fase, dimana syaratnya sudah melewati titik kritis (fase tersulit dalam siklus produk dari mulai pesanan sampai penjualan).

Karena akuntansi berbasis pada accrual, maka pendapatan dapat diakui ketika transaksi terjadi atau dengan kata lain tidak tergantung pada penerimaan kas dari transaksi tersebut, kecuali untuk atau barang yang diatur secara khusus dalam standar akuntansi.

Penyajian pendapatan harus dipisah antara pendapatan yang berasal dari operasi normal perusahaan, seperti penjualan barang atau jasa dengan pendapatan yang bukan berasal dari operasi normal, seperti pendapatan bunga dan pendapatan dividen harus digolongkan ke dalam pos pendapatan lain-lain. Dalam penyajian pendapatan juga dimana harus diperhatikan benar pisah periode pengakuan pendapatan dimana harus diperhatikan benar pisah batasnya karena berkaitan erat dengan konsep *cost against revenue* yang akan menentukan laba rugi periodik.

Pengungkapan yang terkait dengan pendapatan antara lain :

- a. Kebijakan Akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa (PSAK No. 23,2004:P.34).
- b. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan dari :
 - 1). Penjualan barang
 - 2). Penjualan jasa
 - 3). Bunga
 - 4). Royalti
 - 5). Dividen

- c. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa dimasukkan dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan. (PSAK No. 23,2004:P. 34).
- d. Pendapatan yang ditunda pengakuannya.

(b). Beban

Beban merupakan kerugian dan pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan dalam operasinya dalam rangka mencapai laba. (PSAK No. 1,2004). Dalam melakukan penilaian beban dapat diukur melalui dua cara yaitu :

1. Berdasarkan nilai tunai yang dikeluarkan, misalnya biaya gaji dihitung dari nilai tunai gaji yang dibayarkan
2. Berdasarkan hasil estimasi, misalnya untuk mengukur biaya overhead dan piutang tak tertagih dengan menggunakan suatu metode yang sistematis, konsisten yang diperkenankan oleh akuntansi.

Beban pada dasarnya mencakup kerugian maupun beban atau pengorbanan yang dalam aktivitas perusahaan dalam menghasilkan laba (PSAK No. 1,2004:P.78,79). Penyajian beban digolongkan ke dalam tiga kelompok utama yaitu:

1. Harga Pokok
 - a. Biaya bahan baku langsung
 - b. Biaya tenaga kerja langsung
 - c. Biaya overhead

2. Biaya Operasi

- a. Biaya pemasaran
- b. Biaya administrasi dan umum

3. Biaya lain-lain

Beban yang disajikan dalam kelompok utama tadi diklasifikasikan lagi menurut jenisnya masing-masing. Beban juga harus diklasifikasikan berdasarkan periode terjadinya beban. Hal yang perlu diperhatikan adalah pisah batas (*cut off*) dalam mengakui beban karena berkaitan erat dengan konsep *cost against revenue* yang berkaitan dengan pengakuan laba rugi periodik (PSAK No.1,2004).

Pengungkapan yang terkait dengan beban antara lain:

- a. Rincian beban dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada sifat atau fungsi beban dalam perusahaan (PSAK No.1,2004:P.58).
- b. Informasi tambahan mengenai sifat beban, termasuk beban penyusutan, amortisasi dan biaya pegawai (PSAK No.1,2004: P.63).
- c. Dasar penetapan beban serta metode untuk melakukan estimasi beban.
- d. Beban yang ditangguhkan
- e. Informasi lain-lain yang terkait dengan beban

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan perubahan aktiva bersih atau kekayaan suatu perusahaan selama periode tertentu. Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan
- b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas
- c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait
- d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik
- e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya
- f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing, jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan tentang kas masuk dan arus kas keluar atau setara kas suatu perusahaan pada periode tertentu. Dari laporan ini dapat diketahui kemampuan perusahaan suatu perusahaan dalam mengelola sumber-

sumber kas dan setara kas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan (PSAK No.2,2004:P.05).

Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih.

- Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan dari aktivitas perusahaan. Contohnya, penerimaan dan pembayaran rekening giro dan dana pelanggan yang dikelola oleh perusahaan investasi.
- Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, dengan volume transaksi yang benar, dan dengan jangka waktu yang singkat. Contohnya, pembayaran dan penerimaan untuk pembelian dan penjualan surat-surat berharga, pinjaman jangka pendek lain dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK No.1 (2004:P.69), catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan:

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang terpilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting
- b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas
- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar

Pengungkapan lainnya yang juga perlu berdasarkan PSAK No.1 (2004:P.74) antara lain:

- a. Domisili dan bentuk hukum perusahaan
- b. Keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatan utama perusahaan
- c. Nama perusahaan
- d. Jumlah karyawan selama periode bersangkutan

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Praktek Akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah

Banyak faktor yang mempengaruhi praktek akuntansi keuangan pada perusahaan kecil dan menengah. Dalam penelitian ini faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan

Menurut Moekijat (1981:24) pendidikan formal adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh organisasi. Pemilik atau pemimpin perusahaan, dalam hal ini sering disebut dengan manajer adalah individu yang mencapai tujuan melalui orang lain. Mereka mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mengarahkan kegiatan dari orang-orang lain dalam mencapai tujuan (Robbins,1998:5).

Robbins (1998:3) menyatakan pemilik atau pimpinan perusahaan melakukan empat fungsi manajemen, yaitu:

1. *Planning*

Fungsi ini meliputi mendefinisikan tujuan, menegakkan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan.

2. *Organizing*

Mencakup menetapkan tugas-tugas yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa dan dimana keputusan harus diambil.

3. *Leading*

Mencakup memotivasi bawahan, mengarahkan orang-orang lain, memilih saluran-saluran komunikasi yang paling efektif, dan memecahkan konflik-konflik.

4. *Controlling*

Pimpinan memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan kegiatan itu sedang dicapai dengan yang direncanakan dan mengoreksi setiap penyimpangan yang bermakna.

Menurut Siswanto (1987:47), tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi keberhasilan artinya apabila pendidikannya tinggi maka keberhasilan yang dicapai juga tinggi, sebaliknya jika pendidikan rendah maka keberhasilan yang dicapai akan rendah. Holmes dan Nicholls (1989), mengungkapkan bahwa pendidikan manajer atau pemilik perusahaan memiliki hubungan dengan tingkat penggunaan informasi akuntansi. Semakin tinggi pendidikan manajer maka cenderung mereka untuk menggunakan informasi akuntansi yang lengkap dalam pengambilan keputusan juga semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dibandingkan dengan manajer atau pemilik yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar atau pendidikan tingkat lanjutan pertama. Informasi akuntansi yang lengkap didapatkan dari praktek akuntansi keuangan yang baik dan benar pula. Ini berarti bahwa manajer atau pemilik perusahaan yang mempunyai pendidikan lebih tinggi cenderung menerapkan akuntansi keuangan yang baik dan benar dibandingkan manajer atau pemilik perusahaan yang mempunyai pendidikan lebih rendah.

2. Pelatihan Akuntansi

Untuk menjadi tenaga profesional, tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan yang diperoleh dari pendidikan formal saja, tetapi juga dibutuhkan keterampilan lain yang diperoleh dari program pelatihan, kursus dan sebagainya, seperti yang dikemukakan oleh Tilaar (1997:24) yang menyatakan pendidikan formal tidak menjamin bahwa seseorang mempunyai keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Dalam buku Robbins (1998:5), mengatakan bahwa salah satu keterampilan manajer yang multak diperlukan adalah keterampilan teknis (*technical skill*), yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan, atau keahlian spesialisasi. Kemampuan ini diperoleh dari pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal dan non formal dimaksud dapat berupa pelatihan.

Pelatihan merupakan program-program untuk memperbaiki kemampuan dalam pelaksanaan pekerjaan individu/kelompok berdasarkan jenjang jabatan dalam organisasi (Nawawi,1998:208). Pelatihan secara singkat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan di masa datang, kegiatan pelatihan dilakukan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dari peserta pelatihan, perubahan yang dimaksud adalah bertambah pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku (Rivai,2005:226). Demikian juga dengan pelatihan akuntansi,

semakin sering seorang manajer atau pemilik perusahaan mengikuti program pelatihan akuntansi formal maka semakin besar kemungkinan mereka menggunakan informasi akuntansi untuk tujuan pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena mereka mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bidang akuntansi yang mereka peroleh dari pelatihan tersebut di dalam mengelola usaha mereka. Sehingga dengan demikian, diperlukan praktek akuntansi yang baik untuk memenuhi penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan.

Hidjrahman dan Husnan (1986) dikutip dalam Elvia (2004: 13) mengatakan bahwa pelatihan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dalam aktivitas ekonomi. Pelatihan membantu seseorang dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya guna meningkatkan keterampilan, kecakapan dan sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuan.

3. Pengalaman Kerja di bidang Akuntansi

Pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami dalam kehidupan ini. Sebagaimana yang dikutip dalam Nurul (2004:37), menurut Kartini dan Duli (1987), pengalaman adalah riwayat yang dialami oleh suatu organisme pada saat lampau atau persepsi yang sedang dialami dari situasi atau ketidaksadaran yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Jeffry (1992) di bidang psikologi memperlihatkan bahwa seseorang yang berpengalaman dalam suatu bidang substantive, memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai kejadian atau peristiwa yang ditemui.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Libby dan Frederick (1990), Davis (1996) dan Tubb (1992), seperti yang dikutip dalam Nurul (2004:39) dapat diambil kesimpulan bahwa adanya pengalaman seseorang dalam suatu bidang akan membuatnya lebih mampu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Di dalam penelitian-penelitian tersebut pengalamannya adalah pada bidang auditing. Sedangkan pengalaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengalaman kerja di bidang akuntansi yang dimiliki oleh tenaga pembukuan perusahaan semakin berpengalaman tenaga pembukuan suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh adanya pengalaman di bidang akuntansi maka semakin tinggi kemampuan yang dimilikinya.

4. Tinjauan Mengenai Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Undang-undang No. 9 tahun 1995 pasal 2 (Marbun, 1996:2) mendefinisikan usaha kecil sebagai suatu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil

usaha tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Setiap Negara memiliki kriteria yang berbeda-beda, semakin besar pula perhatian negara/institusi bersangkutan terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah (Sunaryanto dan Tambunan,2003).

Di dalam pasal 5 UU No. 9 tahun 1995 juga dijelaskan kriteria usaha kecil sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
3. Milik warga negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hokum, termasuk koperasi.

Dari kriteria menurut UU No. 9 tersebut sama sekali tidak menyinggung jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan entitas (usaha) tersebut.

Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan kecil umumnya adalah:

1. Tidak atau jarang mempunyai perencanaan tertulis
2. Tidak berorientasi pada masa datang (tidak bersifat *going concern*)
3. Tidak memiliki basis pendidikan yang tepat atau relevan dengan bidang usaha yang dijalankan
4. Tidak mempunyai pembukuan yang teratur, neraca dan laporan laba rugi
5. Tidak melakukan analisa pasar yang bersifat *up to date*
6. Kurang memiliki pemahaman terhadap hukum dan peraturan

Sedangkan kriteria usaha skala menengah berdasarkan Intruksi Presiden No.10 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki hasil kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) s.d paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Milik warga Negara Indonesia
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar
4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum

Pengelompokan usaha industri pengolah menurut BPS (1998) adalah sebagai berikut:

1. Industri rumah tangga yaitu perusahaan atau usaha industri pengolah yang mempunyai pekerja 1-4 orang
2. Industri kecil yaitu perusahaan atau usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 5-9 orang
3. Industri menengah yaitu perusahaan atau usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 20-99 orang
4. Industri besar yaitu perusahaan atau industri pengolahan yang mempunyai pekerja 100 orang atau lebih

Sedangkan ciri-ciri khusus usaha kecil di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan dari usaha kecil-kecilan
2. Selain masalah permodalan, masalah lain yang dihadapi usaha kecil bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan usaha
3. Sebagian besar usaha kecil tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi guna memperoleh bantuan baik
4. Hampir 60 % usaha kecil masih mempergunakan teknologi tradisional
5. Hampir setengah perusahaan kecil hanya mempergunakan kapasitas terpasang kurang dari 60 %
6. Pangsa pasar usaha kecil cenderung menurun baik karena faktor kekurangan modal, kelemahan teknologi, maupun karena kelemahan manajerial
7. Hampir 70 % usaha kecil melakukan pemasaran langsung kepada konsumen
8. Tingkat ketergantungan terhadap fasilitas-fasilitas pemerintahan cenderung sangat besar

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No.58 menyatakan usaha kecil sebagai bisnis yang dimiliki karyawan sedikit atau tingkat perputaran aktiva yang rendah. Selain itu dijelaskan pula sifat pengelolaan usaha kecil tersebut yaitu pemisahan tugas yang terbatas dan didominasi oleh manajemen senior atau pemilik terhadap aspek ekonomi bisnis.

Karakteristik usaha kecil di Amerika Serikat menurut AICPA (1984):

1. Perusahaan dimiliki dan fungsi pengendalian berada pada seseorang atau beberapa orang, perusahaan dikelola dan didominasi oleh yang sekaligus menjadi pemilik
2. Manajemen dan pegawainya memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai akuntansi
3. Manajemen menanggapi tidak perlu mempekerjakan orang yang ahli di bidang akuntansi
4. Manajemen mengabaikan pengendalian internal perusahaan
5. Kelemahan pengawasan internal disebabkan oleh:
 - a. Terbatasnya pemisahan tugas karena pegawai relative sedikit
 - b. Pegawai dapat menjamah fisik aktiva perusahaan tanpa pembatasan
 - c. Prosedur kerja didesain secara informal dan pelaporan tergantung pada gaya pemimpin atau pemilik
6. Perusahaan tidak memiliki badan atau staf dan prosedur yang bertugas untuk pengambilan keputusan yang efektif dan efisien

Kamar dagang Indonesia dikutip dalam Sunaryanto dan Tambunan (2003:127) membedakan usaha kecil menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Kelompok usaha dalam bidang perdagangan, pertanian, dan jasa:
 - a. Memiliki modal kurang dari Rp 150.000.000
 - b. Memiliki pendapatan pertahun kurang dari Rp 600.000.000
2. Kelompok usaha dalam bidang industri dan konstruksi:
 - a. Memiliki modal kurang Rp 250.000.000
 - b. Memiliki pendapatan pertahun kurang dari Rp 1.000.000.000

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh kemampuan tenaga pembukuan terhadap kemampuan menyusun laporan keuangan pernah dilakukan Sunaryati (2002) pada usaha koperasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor tingkat pendidikan petugas pembukuan, disiplin ilmu petugas pembukuan dan pelatihan akuntansi yang diikuti petugas pembukuan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan koperasi dalam menyusun laporan keuangan. Secara teoritis, pelatihan yang diikuti oleh tenaga akuntansi akan berpengaruh terhadap praktek akuntansi keuangan. Semakin sering tenaga akuntansi mengikuti pelatihan akuntansi maka pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap ilmu akuntansi akan semakin baik sehingga mereka akan semakin mampu menyusun laporan keuangan dibandingkan dengan tenaga akuntansi yang jarang atau tidak pernah mengikuti pelatihan akuntansi. Akibatnya praktek akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan juga akan tidak semakin memadai.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Deseighty (2004) ditemukan bahwa Industri kecil binaan Disperindag kota Padang melaksanakan pencatatan dimulai dari dokumen berupa faktur yang diotorisasi oleh pemilik atau karyawan. Jurnal yang dibuat umumnya terdiri dari buku penerimaan kas sebesar 50% dan buku pengeluaran kas sebesar 37,5%, buku besar dan buku pembantu sebesar 6,25%. Dalam hal laporan keuangan, tidak satupun perusahaan yang membuat neraca lajur, 18,75% yang membuat necara, 25% yang membuat laporan laba rugi, dan 12,5% yang membuat laporan perubahan modal dan laporan arus kas.

Penelitian yang dilakukan oleh Nana (2007) tentang pengaruh variabel tingkat kebutuhan manajemen atas laporan keuangan, disiplin ilmu, pelatihan dan pengalaman kerja tenaga akuntansi di bidang akuntansi terhadap praktek akuntansi keuangan di Kota Padang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktek akuntansi keuangan pada UKM sudah cukup baik walaupun sepenuhnya masih belum sesuai dengan SAK. Faktor tingkat kebutuhan manajemen atas laporan keuangan, disiplin ilmu, pelatihan akuntansi, dan pengalaman kerja tenaga akuntansi di bidang akuntansi secara bersama-sama memiliki hubungan yang relative kuat dan berpengaruh secara signifikan terhadap praktek akuntansi keuangan pada UKM. Faktor kebutuhan manajemen atas laporan keuangan mempunyai pengaruh yang paling signifikan terhadap penerapan praktek akuntansi keuangan, diikuti oleh faktor disiplin ilmu tenaga akuntansi, pelatihan akuntansi dan pengalaman kerja tenaga akuntansi di bidang akuntansi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2008) tentang analisis penerapan sistem akuntansi pokok pada UKM di kota Padang, ditemukan bahwa usaha kecil umumnya mencatat transaksi yang terjadi pada sebuah buku yang menyatukan pencatatan penerimaan kas dengan penjualan, dan pengeluaran kas dengan pembelian, total penerimaan dan pengeluaran kas tersebut dikurangkan sehingga didapatkan laba atau rugi usaha. Pada usaha menengah, semua perusahaan membuat bukti transaksi yang disetujui oleh pemilik/manajer dan bernomor urut, 75% yang membuat jurnal, dan 62,5% yang membuat buku besar. Sebanyak 87,5% perusahaan yang buku pembantu piutang, 75% membuat buku pembantu hutang, 50% membuat buku pembantu persediaan, dan 25% yang

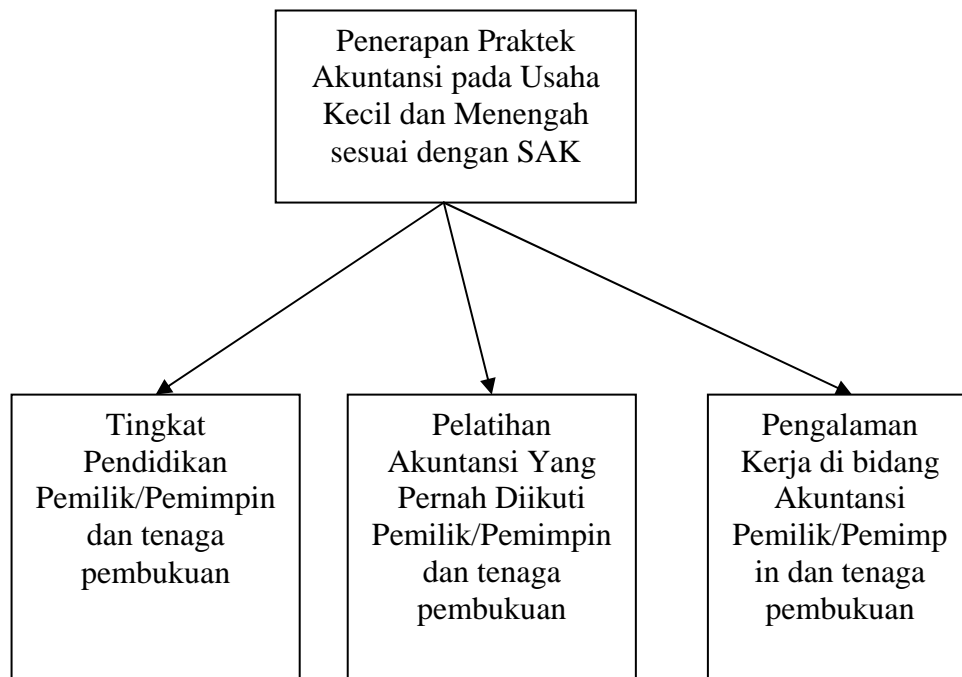
membuat buku pembantu aktiva tetap. Sedangkan untuk laporan keuangan sebanyak 100% perusahaan yang membuat laporan laba rugi dan neraca, 75% yang membuat laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Sistem akuntansi pokok yang dilaksanakan usaha kecil belum mampu menghasilkan informasi akuntansi yang memenuhi syarat kualitatif informasi akuntansi, namun masih dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi akuntansi perusahaan, sedangkan sistem akuntansi pokok yang dilaksanakan oleh usaha menengah telah menghasilkan informasi akuntansi yang memenuhi syarat kualitatif informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi akuntansi perusahaan.

C. Kerangka Konseptual

Pemilik perusahaan kecil sangat jarang memperoleh akses terhadap informasi yang diperlukan untuk mengambil berbagai tindakan dalam operasi perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan kecil dan menengah di Indonesia cenderung tidak menyusun laporan keuangan yang merupakan sumber informasi akuntansi dalam kegiatan usahanya. Ada banyak faktor yang menyebabkan perusahaan kecil dan menengah kurang memfokuskan penyediaan dan penggunaan informasi akuntansi. Salah satunya adalah faktor pendidikan pemilik yang sekaligus pengelola. Pendidikan pemilik atau pengelola yang rendah cenderung mengabaikan akuntansi dalam pengelolaan usaha. Namun hal ini tidak sepenuhnya berlaku untuk perusahaan menengah yang memiliki manajer yang berpendidikan tingkat perguruan tinggi (Holmes dan Nicholls,1989). Selain

pendidikan formal, untuk mendapatkan tenaga profesional dibidangnya, maka pimpinan perusahaan perlu memperoleh pelatihan-pelatihan untuk dapat meningkatkan kemampuan teknisnya dalam mengelola perusahaan (Siswanti, 1987:47).

Pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami dalam kehidupan ini. Sebagaimana yang dikutip dalam Nurul (2004), menurut Kartini dan Duli (1987), pengalaman adalah riwayat yang dialami oleh suatu organisme pada saat lampau atau persepsi yang sedang dialami dari situasi atau ketidaksadaran yang ada. Sedangkan pengalaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengalaman kerja di bidang akuntansi yang dimiliki oleh tenaga pembukuan perusahaan semakin berpengalaman tenaga pembukuan suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh adanya pengalaman di bidang akuntansi maka semakin tinggi kemampuan yang dimilikinya. Dari uraian di atas maka digambarkan kerangka koseptual:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Usaha kecil dan menengah binaan Disperindag apakah mampu menerapkan praktek akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dengan melihat penyusunan akun-akun dalam laporan-laporan keuangan yang dibuat dan sistem akuntansi yang dilaksanakan. Hal ini dikaitkan/dilihat dari faktor tingkat pendidikan, pelatihan akuntansi, dan pengalaman kerja di bidang akuntansi pemilik/pemimpin dan tenaga pembukuan perusahaan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian yang telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Praktek akuntansi pada UKM di kota Padang dilihat dari penyajian laporan keuangan, sistem akuntansi, dan penerapan SAK. Laporan neraca dan laporan arus kas yang membuat sebanyak 31 perusahaan atau (88,6%) dan 26 perusahaan atau (74,2%). Sedangkan yang membuat laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan, yaitu masing-masingnya sebanyak 24 atau (68,6%) perusahaan dan sebanyak 27 atau (77,1%) perusahaan. Rata-rata praktek akuntansi keuangan perusahaan yang termasuk dalam kategori baik adalah akun pendapatan dan akun beban. Untuk akun kas dan bank, piutang, persediaan, aktiva tetap, dan modal dikategorikan cukup. Sedangkan akun utang, dan sistem akuntansi masing kurang.
2. Faktor tingkat pendidikan pemilik/pemimpin dan tenaga pembukuan usaha kecil dan menengah di Kota Padang. Pemilik/pemimpin dengan pendidikan <SMA s/d SMA/SMK sebanyak 9 orang atau (25,7%) orang. Sedangkan pemilik/pemimpin perusahaan yang berpendidikan akhir formal D3 s/d S1/S2 sebanyak 26 (74,3%) orang. Sedangkan tenaga pembukuan UKM di Kota Padang yang berpendidikan <SMA s/d

SMA/SMK sebanyak 14 orang (40%) dan tenaga pembukuan yang berpendidikan D3 s/d S1/S2 sebanyak 21 (60%) orang.

3. Faktor pelatihan akuntansi yang pernah diikuti pemilik/pemimpin dan tenaga pembukuan pada usaha kecil dan menengah di Kota Padang. Pemilik/pemimpin yang pernah mengikuti pelatihan akuntansi sebanyak 24 (68,6%) orang, yaitu pelatihan pengantar akuntansi. Sedangkan pemilik/pemimpin yang tidak pernah mengikuti pelatihan akuntansi sebanyak 11 (31,4%). Tenaga pembukuan UKM Kota Padang yang pernah mengikuti pelatihan akuntansi sebanyak 30 (85,7%) orang, sedangkan tenaga pembukuan yang tidak pernah mengikuti pelatihan akuntansi sebanyak 5 (14,3%) orang
4. Faktor pengalaman kerja yang dimiliki pemilik/pemimpin dan tenaga pembukuan usaha kecil dan menengah di bidang akuntansi pada kota Padang. Pemilik/pemimpin UKM yang telah berpengalaman di bidang akuntansi sebanyak 18 (51,4%) orang pada umumnya di atas 2 (dua), sedangkan pemilik/pemimpin UKM yang tidak memiliki pengalaman di bidang akuntansi sebanyak 17 (48,6%) orang. Tenaga pembukuan yang berpengalaman di bidang akuntansi, yaitu sebanyak 23 (65,7%) orang dan pada umumnya berpengalaman di atas 2 (dua), sedangkan tenaga pembukuan yang tidak berpengalaman di bidang akuntansi sebelumnya sebanyak 12 (34,3%) orang.

Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Belum sempurnanya praktek akuntansi yang dilaksanakan tenaga pembukuan UKM Kota Padang, perlu mendapatkan perhatian serius dari Instansi terkait dengan pengembangan UKM. Menurut penulis, agar Pemerintah mengadakan pelatihan akuntansi yang lebih memfokuskan pada pembuatan laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas yang sesuai dengan SAK dan segera merancang peraturan khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan pembukuan bagi UKM, sehingga praktek akuntansi pada UKM dapat lebih berkembang.
2. Penelitian ini juga bisa dilanjutkan untuk mengetahui faktor lain yang mempunyai kaitan/hubungan terhadap penerapan praktek akuntansi keuangan. Di antara faktor tersebut, misalnya: umur perusahaan, skala usaha, bidang usaha, dan sebagainya. Penelitian ini juga memiliki kekurangan dengan jumlah sampel yang relatif masih kecil, sehingga penelitian tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh usaha kecil dan menengah yang ada. Keterbatasan lain adalah penyebaran sampel yang tidak merata terhadap kelima jenis industri yang digolongkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang. Penelitian ini didominasi oleh industri aneka industri. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada peneliti yang ingin menguji masalah ini lebih lanjut agar menggunakan

jumlah sampel yang lebih besar dan penyebaran sampel yang lebih merata sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2000. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE
- Badan Pusat Statistik. 1998. *Profil Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: BPS
- Baswir. 1998. *Peluang dan Tantangan Usaha Kecil*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Edisi Januari
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2006. *Data Izin Industri Formal*. Padang: Disperindag
- Direktorat Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah. 2002. *Undang-Undang R.I. No.5 tahun 1995*. Jakarta: www.idkm.dprin.go.id
- Direktorat Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah. 2002. *Definisi usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: www.idkm.dprin.go.id
- Harahap, Sofya Syafri. 2003. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Irawan, Prasetya. 1999. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN Press
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyadi. 2002. *Sistem Informasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Moekijat. 1981. *Evaluasi Pegawai Negeri*. Bandung. Sinar Maju
- Mulyadi dan Kanaka Punadireja. 1998. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat
- Hidayani, Nurul. 2004. *Hubungan Pengalaman dan Kesadaran Etis dengan Skeptisisme Profesional Auditor*. Skripsi Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang
- Noviawati, Nana. 2007. *Pengaruh Tingkat Kebutuhan Manajemen atas Laporan Keuangan, Displin Ilmu, Pelatihan Akuntansi, dan Pengalaman Kerja Tenaga Akuntansi terhadap Penerapan Praktek Akuntansi Keuangan Perusahaan Kecil dan Menengah di Kota Padang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Unversitas Negeri Padang